

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 memberi banyak pemikiran dan masalah yang mengakibatkan adanya banyak perubahan, salah satu diantaranya adalah perubahan dalam perumusan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi terdiri dari kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan ekonomi yang digunakan dalam bidang keuangan adalah kebijakan moneter.

Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau Bank Sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Pada pelaksanaannya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, membaiknya perkembangan *output rill*, serta cukup luasnya lapangan / kesempatan kerja yang tersedia (Warjiyo dan Solikin, 2003:2).

Hasibuan dan Pratomo (2012) mengungkapkan informasi mengenai perubahan kebijakan moneter penting dan selalu mendapat perhatian para pelaku ekonomi karena setiap perubahan (*shock*) kebijakan moneter melalui perubahan instrumen moneter akan direspon oleh perubahan perilaku perbankan dan para pelaku dunia usaha yang nantinya mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter. Proses ini yang menggambarkan suatu mekanisme yang dalam teori ekonomi dan kebijakan moneter dinamakan sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Studi mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter menjadi penting baik bagi teori maupun kebijakan moneter. Warjiyo (2004) menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan teori dan kebijakan moneter, studi mengenai transmisi kebijakan moneter bertujuan mengkaji dua aspek penting. Aspek yang pertama untuk mengetahui saluran transmisi mana yang paling dominan dalam ekonomi untuk dipergunakan sebagai dasar perumusan strategi kebijakan moneter. Aspek yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa kuat dan lamanya tenggat waktu masing-masing saluran transmisi tersebut bekerja.

Secara spesifik, Taylor (1995) menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah “*the process through which monetary policy decisions are transmitted changes in real GDP and inflation*”. Kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter umumnya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian yang dijelaskan oleh *Quantity Theory of Money* atau Teori Kuantitas Uang.

Teori kuantitas uang, berasal dari pemikiran salah satu ahli teori moneter pertama yang juga seorang filsuf dan ekonom, David Hume (1711-1776) masih dipandang sebagai alat utama untuk menjelaskan bagaimana uang mempengaruhi ekonomi dalam jangka panjang (Mankiw, 2006:82). Teori ini menggambarkan mengenai analisis hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi dimana jumlah uang beredar (M) dikalikan tingkat perputaran uang (V) sama dengan jumlah *output* atau transaksi ekonomi (T) dikalikan dengan tingkat harga (P).

Ketika mempelajari peran uang dalam perekonomian, para ekonom biasanya menggunakan versi persamaan kuantitas yang agak berbeda. Salah satunya adalah persamaan kuantitas uang versi A. *Marshall*. Pada persamaan kuantitas sebelumnya mengandung masalah, yaitu bahwa jumlah transaksi sulit diukur. Untuk memecahkan masalah tersebut, *Marshall* tidak menggunakan jumlah transaksi (V) melainkan output total dari perekonomian (Y) (Mankiw, 2008:83).

Sementara dalam pelaksanaannya, transmisi kebijakan moneter masing-masing negara berbeda tergantung perbedaan struktur perekonomian, perkembangan pasar keuangan, dan sistem nilai tukar yang dianut. Sesuai dengan Pasal 7, UU NO. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sampai dengan Juli 2005, BI masih menerapkan *base money targeting* dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar ($M1$ dan $M2$). Sejak Juli 2005, Bank Indonesia menjadikan tingkat inflasi secara eksplisit sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter atau sering disebut sebagai *Inflation Targeting Framework* (ITF) (M Abdul dkk, 2008:4).

Bernanke dan Mishkin (1997) mendefinisikan *Inflation Targeting Framework* sebagai sebuah pendekatan kebijakan moneter yang ditandai dengan pengakuan eksplisit bahwa inflasi menjadi tujuan utama dari kebijakan moneter. Keutamaan dari ITF adalah komunikasi pada masyarakat mengenai rencana dan tujuan dari kebijakan moneter. ITF menjadi kerangka kerja kebijakan moneter yang relatif baru digunakan dan diyakini akan membantu Bank Sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan harga.

Popularitas ITF dan klaim peningkatan kinerja perekonomian negara-negara yang menerapkan ITF menarik perhatian Bank Indonesia untuk menerapkan ITF. Penerapan ITF ini menggantikan pendekatan kuantitatif *base money* yang telah lama digunakan Bank Indonesia sebagai jangkar dalam menetapkan kebijakan moneter (Ismail, 2006: 106).

Yustika dan Sulistiani (2010) mengungkapkan terkait Penggunaan *base money* sebagai sasaran operasional pada kenyataannya kurang dapat dikendalikan jumlahnya oleh Bank Sentral, sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pencapaian target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tabel 1.1 berikut menggambarkan kinerja kerangka kebijakan moneter tahun 2000-2003.

Tabel 1.1
Kinerja Kerangka Kerja Kebijakan Moneter, 2000-2003

Tahun	Target Inflasi IHK	Target Pertumbuhan <i>Base Momey</i>	Pertumbuhan <i>Base Money</i>	Inflasi IHK Aktual
2000	5-7%	8,3%	23,4%	9,53%
2001	6-8,5%	11-12%	18,3%	12,53%
2002	9-10%	14-15%	9,3%	10,03%
2003	8-10%	13%	14,25%	5,06%

Sumber: SEKI-Bank Indonesia, 2004.

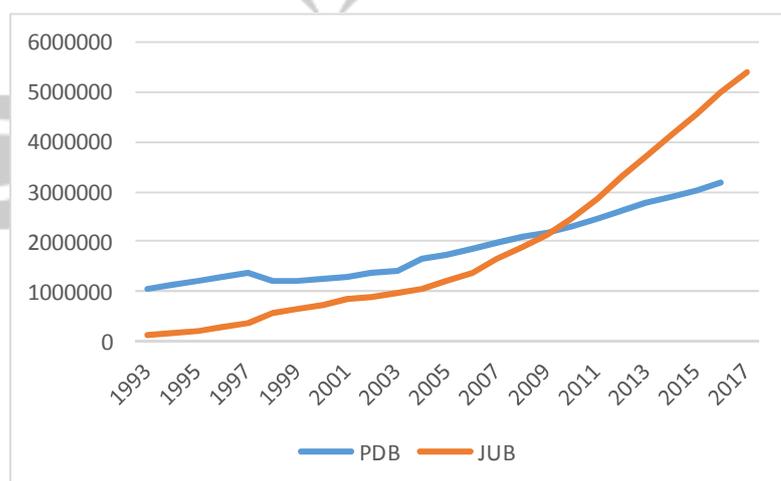
Keterangan : Menggunakan ukuran Indeks Harga Kosumen (IHK) tahun 2000, Bank Indonesia menargetkan inflasi diluar dampak Kebijakan pemerintah sebesar 2-2,5%.

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa kinerja pengendalian *base money* kurang. Pertumbuhan *base money* pada tahun 2000, 2001, dan tahun 2003 diatas target yang telah ditetapkan sementara tahun 2002 pertumbuhan *base money* dibawah target yang ditetapkan. Rendahnya kinerja pengendalian *base money* terutama

disebabkan sulitnya memprediksi perilaku masyarakat dalam memegang uang kartal terutama pascakrisis (Pohan, 2008).

Namun demikian kebijakan moneter dengan ITF bukan tanpa kritik. Berkembangnya ITF tidak bisa dilepaskan dari kontroversi yang panjang diantara pakar-pakar di bidang moneter. Lin dan Yee (2009) menyatakan bahwa penurunan tingkat inflasi bukanlah dampak dari rezim ITF, tetapi tergantung keadaan ekonomi. Rezim ITF tidak memiliki efek signifikan pada tingkat inflasi atau volatilitas.

Berangkat dari pemikiran David Hume yang kemudian dikembangkan oleh *Marshall*, maka variabel yang digunakan adalah jumlah uang beredar (M2) dan produk domestik bruto rill (PDB Rill). Sebagai gambaran awal sebelum melakukan penelitian adapun perkembangan jumlah uang beredar (M2) dan PDB Rill di Indonesia selama periode 1993-2017 dapat diamati melalui Gambar 1.1.



Sumber: Bank Indonesia (SEKI), data diolah.

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2) dan PDB Rill di Indonesia 1993-2017

Berdasarkan Grafik 1.1 perkembangan jumlah uang beredar (M2) dan PDB Rill di Indonesia periode 1993 sampai 2017 secara keseluruhan menunjukkan terjadinya peningkatan. Terlihat pada grafik, peningkatan jumlah uang beredar (M2) diikuti dengan peningkatan PDB Rill.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan dibagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama akan melihat hubungan antara variabel makro sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework*. Selanjutnya, pada bagian kedua, yang lebih penting adalah untuk mereview kembali teori dasar yang digunakan yakni teori kuantitas uang apakah masih berlaku atau tidak, masih relevan atau tidak apabila digunakan pada rezim *Inflation Targeting Framework*.

Berdasarkan uraian di atas, untuk melakukan kajian ulang mengenai relevansi teori kuantitas dalam hubungan variabel moneter pada rezim sebelum dan sesudah diberlakukannya *Inflation Targeting Framework*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Analisis Hubungan Variabel Moneter Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) Periode 1993_{Q1} – 2017_{Q4}**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pola arah kausalitas antara variabel moneter sebelum dan sesudah diberlakukannya rezim *Inflation Targeting Framework*?
- 2) Apakah teori kuantitas masih relevan dan berjalan sesuai dengan adanya rezim ketika sebelum dan sesudah *Inflation Targeting Framework*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui pola arah kausalitas antara variabel moneter sebelum dan sesudah diberlakukannya rezim *Inflation Targeting Framework*.
- 2) Untuk mengetahui relevansi teori kuantitas seiring berjalannya rezim ketika sebelum dan sesudah *Inflation Targeting Framework*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Penulis, sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini.
- 2) Peneliti / Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembandingan studi / penelitian yang terkait dengan riset ini.

- 3) Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
- 4) Pemerintah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam membentuk dan mengambil keputusan.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Diduga terdapat hubungan kausalitas antara variabel moneter sebelum kebijakan moneter ITF.
- 2) Diduga tidak terdapat hubungan kausalitas antara variabel moneter sebelum kebijakan moneter ITF.
- 3) Diduga terdapat hubungan kausalitas antara variabel moneter setelah kebijakan moneter ITF.
- 4) Diduga tidak terdapat hubungan kausalitas antara variabel moneter setelah kebijakan moneter ITF.
- 5) Diduga teori kuantitas relevan atau masih berlaku sebelum adanya kebijakan moneter ITF.
- 6) Diduga teori kuantitas relevan digunakan sebelum adanya kebijakan moneter ITF.
- 7) Diduga teori kuantitas relevan atau masih berlaku digunakan setelah adanya kebijakan moneter ITF.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjadi landasan awal dalam kerangka berpikir. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi konsep dan atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta disajikan studi terkait atau penelitian terdahulu yang diacu dalam penelitian untuk skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dari topik pembahasan yang menjelaskan mengenai data, model data, alat analisis, dan batasan operasional yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu. Sedangkan pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif maupun statistik.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara terpisah.